

## EFEKTIVITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM RANGKA MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI DAERAH PEDESAAN

<sup>1</sup>Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi, <sup>2</sup>Syamsul Hadi  
[bagus@stie-mandala.ac.id](mailto:bagus@stie-mandala.ac.id)

<sup>1</sup>Dosen STIE Mandala Jember

<sup>2</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRACT

*Government policy making BPR as direction Rural Bank specializes in serving rural communities by focusing on effectiveness. The effectiveness of BPR principles need to be applied in interacting with rural communities to build social economy. The research goal is, (1) to determine the effectiveness of that principle has been applied by the BPR in order to help drive the economy of rural communities to realize the people's economy(2) to determine prekreditan system implemented by BPR and its relationship with the effectiveness of BPR in order to formulate the direction government policy towards the development of existing BPR became Rural Bank. Analysis method used is scoring analysis and multiple linear regression. Discussion of the results showed, (1) the general existence of BPR in Jember is quite equally effective in building a democratic economy for rural communities. (2) by multiple linear regression analysis showed that all systems simultaneously credits applied BPR real impact on the efforts to build a democratic economy for rural communities.*

*Keywords : effectiveness , rural banks , community economic*

### **Pendahuluan**

Kebijakan Pemerintah untuk menjadikan BPR sebagai Bank Pedesaan dan membatasi BPR untuk tidak beroperasi dengan menerapkan prinsip efisiensi secara penuh, sesungguhnya mengandung maksud yang baik dan membangun desa. BPR yang diarahkan khusus untuk melayani masyarakat pedesaan dan memperhatikan aspek Efektivitas, diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan pedesaan. Pemerintah sebenarnya juga menggunakan instrumen Bank umum untuk membantu perekonomian masyarakat desa, misalnya memberikan ketentuan bahwa bank umum harus menyalurkan 20% kredit dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Prinsip efisiensi tetap dijaga secara ketat oleh bank umum, akan tetapi upaya ini terkesan kurang fleksibel bagi rakyat kecil.

Munculnya BPR dengan kekuatan berupa kedekatannya dengan masyarakat pedesaan, di samping prosedur pencairan kredit yang mudah dan cepat akan memberikan posisi yang baik bagi BPR dalam masyarakat pedesaan. Selain itu, kehadiran BPR dapat menjadi salah satu kondisi yang kondusif dalam upaya mengatasi krisis ekonomi ini. Penyediaan modal oleh BPR dapat menciptakan akumulasi modal yang relatif kuat bagi dunia usaha menengah ke bawah, yang nantinya diharapkan struktur perekonomian nasional bertumpu (berbasis) pada ekonomi kerakyatan atau *dekonglomerasi*.

Adanya krisis ekonomi yang berkepanjang dan memburuknya kondisi perbankan nasional yang semakin mengkhawatirkan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan BPR menjadi *Rural Bank* yang menerapkan prinsip Efektivitas. Langkah evaluasi perlu dilakukan, di antaranya adalah meninjau kembali arah pengembangan BPR tentang sejauh mana penerapan prinsip Efektivitas yang telah dicapai. Hasil evaluasi diharapkan dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan apakah arah pengembangan BPR tetap menjadi BPR sebagai Bank Pedesaan ataukah diubah menjadi BPR sebagai Bank Rakyat Kecil (*Mikro Bank*). Selain itu, apakah prinsip Efektivitas dapat diterapkan secara aplikatif oleh BPR dalam berinteraksi dengan masyarakat pedesaan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi Efektivitas berbagai bentuk BPR yang ada dalam membantu menggerakkan perekonomian pedesaan guna membangun ekonomi kerakyatan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa BPR mempunyai masalah klasik yang belum terselesaikan dan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit atau dilematis. Satu pihak, BPR tidak memperoleh kredit likuiditas sebagai Bank Umum sehingga sumber permodalan harus diusahakan sendiri dengan biaya tinggi, sementara di pihak lain BPR harus menyalurkan kredit kepada masyarakat pedesaan dengan bunga serendah mungkin.

Menurut Wibisana (1998) bahwa produk yang ditawarkan BPR dibatasi hanya berupa pelayanan kredit dan tabungan dengan pangsa pasar yang secara ekonomis tidak menguntungkan.

## **Tujuan Penelitian**

- (1) Untuk mengetahui prinsip Efektivitas yang telah diterapkan oleh BPR dalam rangka membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.
- (2) Untuk mengetahui sistem perkreditan yang diterapkan oleh BPR dan hubungannya dengan Efektivitas BPR dalam rangka merumuskan kembali arah kebijakan pemerintah terhadap pengembangan BPR yang ada menjadi *Rural Bank*.

## **Tinjauan Pustaka**

Wibisana, dkk (1998), berdasar penelitiannya mengemukakan bahwa dari sudut kesehatan bank, BKK memiliki kesehatan yang bagus, tetapi jelek dari segi pembangunannya. Lukman dalam Adam (1996) memberikan kepada karakteristik dari sistem kredit perbankan yang mengarah pada kepentingan pembangunan pedesaan. Hasbullah (1995) bahwa meskipun sebenarnya lembaga keuangan informal banyak merugikan.

## **Kerangka Konsep Penelitian**

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah pengucuran dan pinjaman tanpa agunan untuk usaha usaha produktif melalui lembaga keuangan terutama didaerah pedesaan. Salah satu lembaga keuangan tersebut yang telah diberikan kepercayaan dan diatur dalam Undang-undang adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Pengembangan BPR selama ini diarahkan pada pembentukan BPR sebagai Bank Pedesaan (*Rural Bank*). Kredit dari BPR meskipun bersekala kecil, tetapi diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan yaitu dengan merangsang aktivitas aktivitas produktif dan kesempatan berusaha. Harapan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian misi kepada BPR untuk menerapkan prinsip Efektivitas di samping efisiensi dalam usahanya. BPR yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki kondisi dan permasalahan yang bervariasi.

Evaluasi terhadap Efektivitas BPR dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu dilakukan untuk meninjau kembali kebijaksanaan mengembangkan BPR menjadi Bank Pedesaan. Tidak semua BPR dapat diharapkan secara realistis untuk menjadi *rural bank* dan efektif dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Efektivitas BPR dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan di daerah pedesaan kemungkinan berkaitan erat dengan sistem kredit yang ditetapkan. Sistem perkreditan yang dipergunakan BPR harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat apabila BPR mengutamakan aspek Efektivitas, artinya sistem pengkreditan BPR yang memiliki karakteristik dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk dengan mudah memanfaatkan kredit tersebut. Kredit dilihat dari jaminan yang dipersyaratkan, tingkat bunga, pola angsuran, jangka waktu pengembalian, serta prosedur dan pelayanan dapat memiliki korelasi yang sangat erat dengan jangkauan BPR terhadap nasabah dan sektor perekonomian, serta upaya memperoleh partisipasi dari masyarakat. Jangkauan terhadap nasabah, sektor perekonomian, dan partisipasi dari masyarakat dipergunakan untuk mengukur Efektivitas BPR, artinya Efektivitas BPR yang dimaksud adalah secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan melalui pemanfaatan modal pinjaman dari BPR.

### **Hipotesis**

Untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan penelitian ini dengan berdasarkan kepada landasan teoritis, permasalahan yang berkembang, dan penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa BPR yang beroperasi di Kabupaten Jember dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan berjalan secara efektif.
2. Diduga bahwa biaya administrasi, tingkat bunga, serta prosedur dan angsuran, proses penetapan jangka waktu pengembalian, serta prosedur dan pelayanan BPR berhubungan dengan jangkauan terhadap nasabah, jangkauan terhadap sektor perekonomian dan partisipasi masyarakat.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa (fenomena) secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *action research* atau evaluasi formatif dan Sumatif (Singarimbun, 1987) dan metode Studi Kasus (Nazir, 1985 dan Surakhmad, 1982). Penggunaan metode sensus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara nyata tentang lembaga BPR dalam rangka membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan atas pertimbangan jumlah populasinya hanya 28 unit. Selanjutnya dipilihnya metode penelitian tindakan atau evaluasi formatif ini atas dasar pertimbangan bahwa obyek penelitian adalah sebuah program yang masih sedang berlangsung. Adapun metode evaluasi sumatif digunakan untuk meneliti dan mengukur apakah program tersebut tercapai, dalam hal ini mengukur efektivitas BPR dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di daerah pedesaan. Sedangkan maksud penggunaan metode Studi Kasus dalam penelitian ini adalah karena subyek penelitian terdiri dari satuan unit (lembaga dan nasabah) untuk dikaji secara mendalam, mendetail dan intensif untuk menghasilkan gambaran yang bersifat “*longitudinal*”.

Lokasi penelitian ini telah dilakukan disalah satu wilayah Kerja Bank Indonesia (BI) Jember, yaitu di Kabutpaten Jember secara *purposive sampling* atas pertimbangan bahwa Kabupaten Jember mempunyai jumlah BPR dan nasabah terbanyak di antara tiga kabupaten lainnya sewilayah kerja. Pengambilan sampel dilakukan terhadap dua jenis populasi, yaitu populasi pertama adalah lembaga BPR sebagai kelompok kreditur yang ada pada setiap wilayah kecamatan secara keseluruhan dan populasi kedua adalah nasabah sebagai kelompok debitur dari masing-masing BPR terpilih dengan menggunakan Prosedur *Probability Sampling* Singarimbun, (1987). Sementara itu, penentuan sampel untuk jenis kedua (nasabah) dilakukan dengan prosedur *Multistage Sampling* dengan menggunakan tiga tahap sebagai berikut Surakhmad (1982), Singarimbun, (1986) dan Hidayat, (1987).

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari BPR sampel dan nasabah BPR tersebut dengan menggunakan teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Singarimbun, 1987). Wawancara terhadap nasabah dilakukan untuk mengetahui karakteristik sistem kredit BPR dari sudut pandang nasabah. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi yang terkait termasuk Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

1. Variabel jangkauan terhadap nasabah terdiri dari dua indikator sebagai berikut
  - a) Jumlah nasabah masing-masing BPR diukur dengan cara mengamati jumlah nasabah baik yang meminjam maupun yang menabung yang dinyatakan dalam satuan orang.
  - b) Rata-rata pertumbuhan jumlah nasabah pertahun diukur dengan berapa total pertumbuhan jumlah nasabah per tahun, kemudian dibagi 7 dan dinyatakan dalam satuan orang.
2. Variabel jangkauan terhadap sektor perekonomian terdiri dua indikator yaitu
  - a) Proporsi jumlah nasabah per sektor ekonomi dapat diukur dengan membandingkan jumlah nasabah masing-masing sektor ekonomi dengan total nasabah BPR, kemudian untuk mengetahui proposional tidaknya maka dibandingkan dengan distribusi angkatan kerja secara keseluruhan pada BPR itu dan dinyatakan dalam satuan (%).
  - b) Proporsi alokasi kredit per sektor ekonomi diukur dengan jumlah alokasi kredit pada masing-masing sektor ekonomi terhadap total alokasi kredit yang kemudian dibandingkan dengan distribusi angkatan kerja secara keseluruhan pada masing-masing BPR dan dinyatakan dalam satuan presentase (%).
3. Variabel partisipasi masyarakat terdiri dari dua indikator sebagai berikut:
  - a) Persentase nasabah penabung dari total nasabah.
  - b) Persentase tabungan masyarakat dari total asset BPR.

4. Efektivitas BPR dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan dapat diukur dari total skor penjumlahan antara nilai skor variabel jangkauan terhadap nasabah, jangkauan terhadap sektor ekonomi dan partisipasi masyarakat yang sudah dibagi menjadi beberapa item.
5. Ukuran dari masing-masing sistem kredit adalah berdasarkan pengembangan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Mubyarto dan Hamid (1986), Adam (1996) dan Wibisana *dkk* (1988) dalam Asnawi Dwi (1999) sebagai berikut:
  - a. Adanya biaya administrasi dapat diukur dari besarnya nilai potongan administrasi atas pencairan/relasi kredit yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan tingkat bunga dinyatakan dalam 1%.
  - b. Pola angsuran:
    1. Variatif apabila terdapat pilihan pola angsuran selain bulanan seperti harian, mingguan, pasaran, dan sebagainya dinyatakan dalam satuan boneka  $D = 1$ .
    2. Tidak variatif apabila pola angsuran ditetapkan hanya bulanan saja dinyatakan dalam satuan dummy  $D = 0$ .
  - c. Penetapan jangka waktu pengembalian:
    1. Akomodatif: nasabah diberikan kesempatan untuk memilih jangka waktu pengembalian sesuai dengan keinginan nasabah dinyatakan dalam satuan dummy  $D = 1$ .
    2. Tidak akomodatif: nasabah tidak diberikan kesempatan untuk memilih jangka waktu pengembalian sesuai dengan keinginan nasabah dinyatakan dalam satuan dummy  $D = 0$ .
  - d. Prosedur pinjaman kredit dapat diukur persepsi nasabah tentang mudah tidaknya mekanisme peminjaman kredit dinyatakan dalam satuan dummy,  $D = 1$  dinilai mudah dan  $D = 0$  bila lainnya. Pelayanan dapat diukur dengan cara persepsi nasabah tentang cepat lambatnya dalam melayani peminjaman kredit dinyatakan dalam satuan dummy,  $D = 1$  bila dinilai cepat dan  $D = 0$  bila lainnya.

## **Metode Analisis Data**

### **Pengujian Hipotesis pertama**

Untuk membuktikan hipotesis yang pertama tentang Efektivitas BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan digunakan *analisis scoring*. Pertimbangan penggunaan analisis ini adalah didasarkan pada pengembangan skala untuk mengukur sikap masyarakat terhadap suatu aspek tertentu yang dikenal dengan skala Likert (Nazir, 1983). Pengukuran masing-masing item tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Jangkauan BPR terhadap nasabah debitur ( Nilai Maksimal = 6):
  - a. Rata-rata jumlah nasabah debitur pada masing-masing BPR:
    - Kurang dari 910 nasabah (1),
    - Antara 910 - 1.300 nasabah(2),
    - Lebih dari 1.300 nasabah (3).
  - b. Rata-rata pertumbuhan jumlah nasabah per tahun pada masing-masing BPR :
    - Pertumbuhan kurang dari 195 nasabah (1)
    - Pertumbuhannya antara 195 – 300 nasabah(2)
    - Pertumbuhannya lebih dari 300 nasabah (3)
- (2) Jangkauan BPR terhadap sektor ekonomi ( Nilai Maksimal = 6):
  - a. Rata-rata proporsi jumlah nasabah per sector ekonomi per tahun:
    - Tidak proposional bila kurang dari 10% (1)
    - Kurang proposional bila antara 10% - 20%(2)
    - Proporsional bila lebih dari 20%(3)
  - b. Rata-rata proporsi jumlah alokasi kredit per sektor ekonomi :
    - Tidak proposional bila kurang dari 10% (1)
    - Kurang proposional bila antara 10% - 20%(2)
    - Proporsional bila lebih dari 20%(3)
- (3) Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan BPR (Nilai Maksimal = 6):
  - a. Rata-rata persentase nasabah penabung dari total nasabah:
    - Kurang dari 55% nasabah (1)
    - Antara 55% - 75% nasabah(2)



- Lebih dari 75% nasabah (3)
- b. Rata-rata persentase jumlah tabungan masyarakat dari total aset lembaga:
  - Kurang dari 55% nasabah (1)
  - Antara 55% - 75% nasabah(2)
  - Lebih dari 75% nasabah (3)

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika total skor 6: berarti peranan BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan **kurang efektif**.
2. Jika total skor 7 - 12: berarti peranan BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan **cukup efektif**.
3. Jika total skor 13 - 18: berarti peranan BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan **efektif**.

#### **Pengujian Hipotesis Kedua**

Untuk menguji hipotesis yang kedua tentang dugaan adanya hubungan (korelasi) antara sistem kredit dengan Efektivitas BPR secara simultan digunakan alat analisis model regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Penggunaan alat analisis ini disamping untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut, juga untuk meramalkan seberapa besar perubahan peningkatan Efektivitas BPR apabila terjadi perbaikan sistem kredit (Draper dan Smith, 1992). Adapun model rumusan matematis yang digunakan untuk memformulasikan hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

$$Y_i = + 1X_1 + 2X_2 + 3D_3 + 4D_5 + \epsilon$$

Di mana:

$Y_i$  = Efektivitas setiap BPR yang ukuran besar kecilnya diperoleh dari **total**

**Scoring** (dalam Hipotesis pertama)

1 = Koefisien hubungan variabel independent dengan dependent ke 1

2 = Koefisien hubungan variabel independent dengan dependent ke 2

$X_1$  = Tingkat bunga yang diberlakukan terhadap pinjaman modal (persen).

$X_2$  = Biaya administrasi permohonan kredit dari plafon pinjaman (persen).

$D_1$  = Variatif tidaknya pola angsuran yang ditawarkan kepada nasabah dalam

Satuan Dummy  $D = 0$  bila tidak variatif, dan  $D = 1$  bila variatif.

- D2= Memberikan kesempatan nasabah untuk memilih jangka waktu pengembalian sesuai dengan keinginannya dinyatakan dalam satuan dummy = 0, bila tidak berikan kesempatan memilih (tidak akomodatif) = 1, bila ada kesempatan (akomodatif).
- D3 = Persepsi nasabah tentang prosedur pinjaman kredit dalam satuan dummy = 0, bila mekanismenya sulit dan D =1 ,bila mekanismenya sedang – mudah.
- D4 = Persepsi nasabah tentang pelayanan BPR dalam pemberian kredit dalam satuan dummy ; D = 0 , bila lambat dan D =1, bila sedang – cepat.
- D5 = adanya aturan wajib atau tidak untuk menabung bagi debitur yang dinyatakan dalam satuan dummy ; D = 0, bila wajib dan D = 1 bila lainnya.
- $\epsilon$  = Variabel pegganggu (residu).

Selanjutnya untuk menguji model yang dipakai lebih dahulu dilakukan Uji-F (uji keragaman) dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$$

$$H_1 : \text{Paling sedikit ada salah satu } \beta_i \neq 0$$

Adapun kriteria keputusan dari hasil pengujian diatas adalah jika F-hitung  $\leq$  F-tabel  $(1-\alpha) (k-2 ; n-k)$ ,  $H_0$  diterima dan jika F-hitung  $>$  F-tabel  $(1-\alpha) (k-2 ; n-k)$ , berarti  $H_1$  diterima. Sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut, maka dilakukan pengujian terhadap keeratan hubungan antara variabel terikat dengan bebas. Kemudian pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara setiap indikator sistem kredit terhadap setiap Efektivitas BPR secara parsial dengan uji-t.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektivitas BPR dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan**

Indikator untuk mengetahui jangkauan terhadap nasabah adalah jumlah nasabah dan pertumbuhan jumlah nasabah per tahun. Semakin banyak jumlah nasabah berarti semakin banyak masyarakat pedesaan yang dapat memanfaatkan kredit. Adapun pertumbuhan jumlah nasabah yang tinggi menunjukkan bahwa BPR memperhatikan perluasan pasar atau memperhatikan pemberian kredit kepada sebanyak mungkin masyarakat pedesaan. Pemerataan manfaat kredit di daerah pedesaan hendaknya tidak hanya memperhatikan jumlah masyarakat yang menerima, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan terhadap setiap sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dana yang ada diharapkan mampu dimanfaatkan masyarakat yang bergerak di semua sektor yang ada secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan eksistensinya dalam perekonomian pedesaan.

Unsur obyektivitas dalam menyalurkan kredit menjadi salah satu kunci terhadap nilai proposionalitas lembaga BPR dalam rangka mewujudkan *Rural Bank* untuk membangun ekonomi kerakyatan pada saat bangsa ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk mengetahui proporsi kegiatan ekonomi pada berbagai sektor yang ada adalah dengan mempergunakan data proporsi angkatan kerja dan alokasi kredit yang dikucurkan per sektor ekonomi per kecamatan di mana BPR itu berada. Data sekunder ini dianggap dapat mewakili kegiatan ekonomi di tiap-tiap sektor. Bantuan modal untuk pembangunan ekonomi pedesaan tepat mengenai sasaran apabila diberikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas masing-masing sektor ekonomi. Idealnya sektor penyerap angkatan kerja yang semakin besar harus lebih diutamakan dalam perolehan alokasi kredit, dan sebaliknya.

Dalam analisis data ini digunakan konsep pemerataan yang sama dengan pertimbangan bahwa permodalan BPR masih belum dapat menjangkau seluruhnya sektor-sektor ekonomi yang ada. Bahkan untuk mengalokasikan kredit pada sektor pertanian saja di tiap-tiap desa, modal BPR tidak mampu memenuhinya. Berdasarkan kondisi secara nasional Efektivitas BPR bahwa jangkauan nasabah

menurut sektor ekonomi khususnya di Kabupaten Jember tidak berbeda secara proporsionalitasnya. Porsi untuk sektor pertanian dan perindustrian tidak seimbang menurut jumlah angkatan kerja yang berada pada masing-masing sektor ekonomi yang dimaksud. Alokasi kredit BPR di Kabupaten Jember masih dapat digolongkan proporsional bila dibandingkan secara nasional.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa diantara ketiga sektor yang teralokasi ternyata yang kurang proporsional pengalokasian kredit adalah sektor pertanian dan cenderung lebih memperhatikan sektor secara ekonomis dianggap lebih menguntungkan usahanya seperti sektor perdagangan dan jasa. Sesuai dengan penilaian Dumairy (1984) bahwa alokasi yang tidak proporsional akan memperkecil kualitas pinjaman dilihat dari aspek pemerataan. Sektor pertanian tidak memperoleh proporsi alokasi kredit sebagaimana mestinya akibat sifat usaha taninya, di mana menurut pihak perbankan mengandung risiko tinggi.

Beberapa alasan yang menyebabkan BPR kurang memperhatikan sektor pertanian, khususnya budidaya adalah (Adam, 1996): Usahatani sangat bergantung kepada alam (musim, cuaca, bencana alam dll), hasil produksinya mudah rusak, harganya sangat berfluktuatif dan permodalannya termasuk jangka menengah dan panjang.

Mengingat tabungan masyarakat yang potensial bagi penggerakkan perekonomian masyarakat desa, maka efektivitas BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan pada masyarakat desa tidak lepas dari upaya untuk memperoleh peran aktif masyarakat dalam permodalan BPR. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa BPR dapat dikatakan memiliki kemampuan relatif kurang untuk memperoleh partisipasi masyarakat. Secara nasional bahwa perkembangan tabungan masyarakat pada BPR dalam 6 tahun terakhir mengalami penurunan dari 2.680 milyar rupiah menjadi 1.981 milyar rupiah. Khususnya di provinsi Jawa Timur perhimpunan dan rupiah cukup mengembirakan dalam 7 tahun terakhir di mana jumlah tabungan masyarakat pada BPR mencapai 57.532 milyar rupiah meningkat menjadi 97.993 milyar rupiah atau naik 70.33%. Berbeda dengan partisipasi masyarakat berupa tabungan, simpanan berupa simpanan berjangka secara nasional mengalami peningkatan cukup signifikan

dalam 7 tahun terakhir yaitu 150 milyar rupiah menjadi 1.092 milyar rupiah. Hal ini terjadi karena simpanan berjangka lebih terjamin keamanannya apalagi diikuti Lembaga Penjamin Simpanan.

Dari hasil observasi di lapangan, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan BPR dalam memperoleh tingkat partisipasi dari masyarakat pedesaan terutama yang terkait dengan jumlah penabung dan besarnya tabungan/simpanan, diantaranya:

- 1) Strategi Jemput bola. Pembukaan po-pos pelayanan keliling terutama di daerah-daerah strategis seperti di pasar, balai desa, sekolahan, warung, dan tempat lain yang sering didatangi warga.
- 2) Tabungan Wajib. Setiap debitur diwajibkan menabung sebagai investasi masyarakat dalam rangka untuk penumpukan modal BPR dan membantu pembangunan di daerah pedesaan. Tabungan nasabah dibukukan pada buku tabungan dan pada saat pelunasan angsuran terakhir, tabungan dapat dicairkan. Besarnya bunga tabungan wajib, bervariasi tergantung dari besarnya pinjaman, pola angsuran, dan jangka waktu pengembalian. Peranan tabungan masyarakat penting artinya bagi BPR untuk memperkuat permodalan. Tabungan ini selanjutnya dikelola oleh BPR untuk membiayai masyarakat yang lain sehingga membentuk rangkaian perputaran modal.

Akumulasi modal di daerah sekitar BPR akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyaknya penabung dan semakin besar jumlah tabungan, berarti berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini berarti BPR akan lebih Efektif dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Secara keseluruhan hasil *Analisis Scoring* dengan skala *Likert* menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Artinya bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “*BPR dapat membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Jember berjalan secara efektif*” **ternyata terbukti**.

Rata-rata nilai skor yang diperoleh dari hasil analisis tersebut mencapai 9,18, cukup Efektif dalam membantu membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di daerah pedesaan seperti yang tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Skoring Mengenai Efektivitas BPR di Kabupaten Jember

No	Nama PT / KBPR	Kecamatan	Total Skor	Keterangan
1	Sinar Wuluhan Artha	Wuluhan	6	Kurang Efektif
2	Bimi Hayu	Ambulu	8	Cukup Efektif
3	Ambulu Dana Artha	Rambipuji	8	Cukup Efektif
4	Delta Jember	Ambulu	13	Cukup Efektif
5	Bumi Hayu Pratama	Balung	10	Cukup Efektif
6	Rambi Artha Putra	Rambipuji	9	Cukup Efektif
7	Astha Asri Mulya	Mayang	7	Cukup Efektif
8	Sukowono Artha Jaya	Sukowono	12	Cukup Efektif
9	Surya Kencana	Sukowono	12	Cukup Efektif
10	Artha Tunas Mukti	Sukowono	12	Cukup Efektif
11	Eka Usaha	Sukowono	12	Cukup Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>9.18</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar BPR (90.91%) tergolong cukup efektif dalam peranannya membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan. Selebihnya (9.09%) masih kurang memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pencapaian tujuan pengoperasiannya terhadap sektor ekonomi yang ada berdasarkan analisis skoring versi penelitian ini. Hal ini terjadi di wilayah kecamatan sedang/suplus yaitu yang berada di Kecamatan Wuluhan, sementara di wilayah minus sebagian BPR dapat berjalan dengan tingkat Efektivitas relatif lebih tinggi dan hampir mencapai nilai efektif seperti BPR di Kecamatan Sukowono. Indikator rendahnya efektivitas BPR di Kabupaten Jember berada pada instrument/aspek pertumbuhan jumlah nasabah, jumlah tabungan nasabah dan rata-rata jumlah nasabah penerima kredit per sektor ekonomi dengan rata-rata perolehan nilai skor masing-masing sebesar 12. Rendahnya pertumbuhan nasabah disebabkan faktor internal dan eksternal lembaga seperti semakin banyaknya kompetitor dan sistem kredit yang dirasa masyarakat belum *bankable*. Kemudian rendahnya skor proporsi jumlah nasabah per sektor ekonomi karena faktor

lembaga BPR cenderung memberikan kredit kepada jenis pekerjaan yang berisiko rendah dengan tingkat perputaran modal relatif cepat. Sedangkan rendahnya nilai skor rasio jumlah tabungan dari total asset lembaga adalah disebabkan karena setiap nasabah yang menabung jumlah simpanannya relatif sedikit walaupun terdapat BPR dengan jumlah nasabah penabung lebih dari 50% terhadap total nasabah. Selain itu, sebagian BPR tidak mewajibkan menabung bagi nasabah debitur, walaupun sebagian yang lain mewajibkannya dengan pola tertentu.

### Hubungan Sistem Perkreditan dengan Efektivitas BPR

Hasil analisis data dengan menggunakan model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengkreditan BPR yang diterapkan kepada nasabah mempunyai pengaruh nyata (*significant*) terhadap efektivitas BPR dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan seperti yang tampak pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda Terhadap Beberapa Sistem Pengkreditan yang Memengaruhi Efektivitas BPR di Kabupaten Jember

No	Variabel Independent	B	Standar Error
1	Suku Bunga Pinjaman (X1)	-0.550*	0.271
2	Biaya Administrasi	-0.225*	0.091
3	Pola Angsuran	-1.337**	0.351
4	Kesempatan Memilih Jangka Waktu Pengembalian (D2)	-1.087*	0.382
5	Persepsi tentang Prosedur Pengajuan Kredit (D3)	-0.790 NS	1.005
6	Persepsi tentang Pelayanan BPR (D4)	-0.790 NS	1.005
7	Aturan Tabungan Wajib (D5)	0.235 NS	0.351
8	Konstanta	15.06	1.310
F-hitung = 9.522    F-tabel (1%) = 2.95			
Adjusted-R = 0.471    t-tabel (1%) = 2.66    t-tabel (1%) = -2.66			
R-Squared = 0.526    t-tabel (5%) = 2.00    t-tabel (5%) = -2.00			

Variabel Dependent = Jumlah Skor Efektivitas Masing-masing BPR

\*\* = Significant pada tingkat kepercayaan 1%

\* = Significant pada tingkat kepercayaan 5%

NS = Non significant

Pada Tabel 2 tampak bahwa hasil analisis menunjukkan secara simultan semua variabel bebas berpengaruh nyata terhadap peran BPR dalam membantu menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat pedesaan. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah adanya sebuah lembaga keuangan mikro (bank desa/ BPR) yang memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat pedesaan yang membawa implikasi terhadap terbangunnya iklim usaha yang kondusif. Sistem kredit BPR yang diterapkan dapat mendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan BPR dan sekaligus mampu menggerakkan perekonomian di daerah pedesaan dengan sifat *bankable*-nya. Sistem tersebut diberlakukan karena bertujuan selain mengupayakan prinsip-prinsip efisiensi juga mengutamakan prinsip efektivitas yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas bagi nasabah dan sektor-sektor perekonomian yang ada. Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat disusun rumusan matematis sebagai berikut:

$$Y_i = 15,061 - 0,550X_1 - 0,225X_2 - 1,337D_1 - 1,087D_2 - 0,790D_3 - 0,790D_4 + 0,235D_5$$

Guna menguraikan secara parsial tentang pengaruh setiap sistem perkreditan terhadap efektivitas BPR, masing-masing variabel akan dibahas seperti di bawah ini.

### **Besar Bunga Pinjaman**

Dari Tabel 2 di atas diketahui bahwa variabel ini berpengaruh nyata terhadap variabel dependent. Semakin tinggi tingkat bunga yang diberlakukan sebesar 1%, maka efektivitas akan semakin menurun sebesar 0.55% dan sebaliknya. Artinya semakin tinggi tingkat bunga maka kecenderungan nasabah yang memanfaatkan kredit di lembaga tersebut menjadi semakin berkurang dan sebaliknya. Apalagi banyak lembaga keuangan yang memberlakukan bunga pinjaman relatif rendah dengan atau tanpa anggunan. Secara empiris diketahui bahwa bunga pinjaman di BPR pada umumnya relatif tinggi dibandingkan dengan bank umum yang ada di kecamatan-kecamatan, yaitu berkisar antara 24% - 48% per tahun.



### **Biaya administrasi**

Pemberlakuan biaya administrasi bagi proses pengambilan kredit sangat memengaruhi terhadap efektivitas BPR. Semakin tinggi biaya administrasi maka jangkauan terhadap masyarakat cenderung sempit dan sebaliknya. Kondisi ini terbukti secara empiris bahwa jika biaya administrasi dinaikkan sebesar 1%, maka efektivitas BPR cenderung menurun sebesar 0.23% dengan asumsi *ceteris paribus*. Diketahui bahwa rata-rata debitur dikenai biaya administrasi cukup tinggi yaitu 5% dari besar pinjaman, maka hal itu akan berpengaruh minat masyarakat untuk mengakses kredit kepada BPR dimaksud terutama untuk jenis kredit investasi dan modal kerja.

### **Pola Angsuran**

Dari seluruh BPR yang diamati sebanyak 51.25% di antaranya menerapkan pola angsuran yang variatif, yaitu musiman, bulanan, dan dua bulanan, selebihnya mutlak hanya ditentukan bulanan saja termasuk terhadap nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha pertanian. Sehingga sistem kredit dengan pola angsuran ini sangat berpengaruh nyata terhadap efektivitas BPR namun kondisi tersebut tidak didukung oleh hasil analisis regresi di mana nilai koefisiennya mencapai -1.34 yang berarti jika BPR menerapkan pola angsuran yang semakin variatif, maka efektivitas BPR akan semakin menurun sebesar 1.34%. Hal ini diketahui bahwa masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan apapun pola angsuran yang diberlakukan oleh BPR, yang terpenting bagi calon nasabah adalah dapat meminjam dengan mudah dan cepat cair.

### **Kesempatan Memilih Pola Angsuran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 75% BPR yang tergolong akomodatif. Akomodatif yang dimaksud memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilih pola angsuran baik bulanan, dua bulanan, dan musiman (6 bulan). Namun demikian kemudian BPR tetap memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap setiap pola angsuran yang ditawarkan baik kelebihan maupun kekurangannya. Hasil analisis yang dilakukan diperoleh sebuah fakta bahwa sistem kredit dengan adanya kesempatan memilih pola angsuran ini justru dapat menurunkan efektivitas BPR sebesar 1.087% pada tarif nyata 1%. Hal ini

bertentangan dengan logika ekonomi dan teori yang ada, biasanya semakin akomodatif BPR dalam menentukan pola angsuran maka semakin efektif.

### **Persepsi Tentang Prosedur Pinjaman dan Pelayanan Nasabah**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa hampir semua BPR memiliki prosedur yang relatif mudah dengan tingkat pelayanan yang cukup memuaskan. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur seperti yang dijelaskan dibagian terdahulu dalam bab ini termasuk tahapan survei bagi calon debitur pertama dan tanpa melalui tahapan disurvei jika melakukan pinjaman kedua kalinya. Sehingga sebanyak 12% nasabah menyatakan bahwa prosedur sulit, sedangkan 22% dan 66% menyatakan sedang dan mudah. Namun hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel prosedur kredit ini non signifikan terhadap variabel dependent pada taraf nyata 5%. Dengan kata lain bahwa semakin mudah prosedur kredit dengan pelayanan yang cukup baik maka efektivitas BPR semakin lemah atau jangkauan kepada masyarakat semakin sempit sebesar 0.79% dan sebaliknya.

### **Aturan Tabungan Wajib**

Sesungguhnya ada tidaknya aturan yang mewajibkan debitur untuk menabung pada BPR bersangkutan tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap efektivitas BPR tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier sederhana bahwa  $t\text{-hitung} (0.970) < t\text{-tabel} (2.00)$  pada taraf nyata 5%. Bahkan bagi BPR yang mewajibkan debiturnya menabung dan dicairkan setelah angsuran lunas, maka hal ini cenderung tidak akan mengurangi jumlah nasabah. Apalagi didukung oleh nilai koefisien regresi bahwa apabila BPR memberlakukan wajib menabung bagi debitur, maka efektivitas semakin naik sebesar 0.235%. Oleh karena itu, jumlah BPR yang memberlakukan wajib dan tidak wajib menabung cenderung seimbang yaitu masing-masing sebesar 42% dan tidak mewajibkan sebesar 58%, terlebih hasilnya non signifikan. Pemberlakuan sistem kredit dimaksud justru dapat membantu masyarakat lain untuk dapat pinjaman kredit atas penumpukan modal oleh BPR apalagi simpanan nasabah tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Walaupun demikian, sebagian nasabah pada dasarnya kurang berkenan jika BPR mewajibkan untuk menabung.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Secara umum keberadaan BPR di Kabupaten Jember tergolong **cukup efektif** dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Analisis Skoring bahwa diukur dari jangkauan terhadap nasabah, jangkauan sektor ekonomi, dan partisipasi masyarakat mencapai nilai 9.18 dengan rincian sebagai berikut: 90.91% BPR tergolong **Cukup Efektif**, dan selebihnya 9.09% BPR tergolong **Kurang Efektif**.
2. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan secara simultan bahwa semua sistem kredit yang diterapkan BPR berpengaruh nyata terhadap proses upaya membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F bahwa nilai F-hitung (9.522) > F-tabel (2.95) pada taraf nyata 1%. Namun secara parsial sistem kredit yang diberlakukan tidak seluruhnya berpengaruh nyata terhadap efektivitas BPR seperti persepsi nasabah tentang prosedur pengajuan kredit, persepsi nasabah tentang pelayanan BPR terhadap nasabah, dan ada tidaknya kewajiban debitur untuk wajib menabung. Secara parsial yang berpengaruh nyata adalah adanya biaya administrasi, suku bunga pinjaman, kesempatan memilih jangka waktu pengembalian dan pola angsuran yang diterapkan.

### **Saran**

1. Perlu adanya arah kebijakan dalam pengembangan BPR sebagai *Rural Bank* menjadi Bank Rakyat Kecil (*Micro Bank*) agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas baik pada aspek jumlah nasabah, sektor ekonomi maupun menjangkau tingkat partisipasi masyarakat. Sehingga BPR yang beroperasi di daerah perkotaan sebaiknya menjemput bola dengan cara menambah kantor perwakilan di daerah pedesaan.
2. Agar BPR menjadi lembaga keuangan rakyat kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah, maka sebaiknya BPR dikembangkan menjadi lebih *bankable* dengan ciri-ciri sistem kredit yang lebih simpel, tingkat suku bunga pinjaman diturunkan, biaya administrasi tidak lebih dari 2% dari plafon, dan memproporsionalkan suku bunga simpanan baik berjangka maupun berupa

tabungan. Demikian pula jangkauan terhadap sektor ekonomi proporsionalitasnya lebih dikuatkan terutama bagi sektor pertanian dan industri yang selama ini memperoleh porsi kurang seimbang. Selain itu, batas minimal perlu ditinjau kembali terkait dengan arah pengembangan BPR menjadi Bank Rakyat Kecil termasuk tahapan kegiatan survei lokasi calon debitur dilaksanakan lebih cepat dan mudah serta mengedepankan unsur kekeluargaan.

3. Ukuran atau standar baku mengenai efektivitas BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan perlu segera ditetapkan oleh lembaga berwenang. Ukuran tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BPR seperti manajemen, sumber daya manusia, geografi, pemanfaatan teknologi informasi dan perlunya pendampingan teknis dan manajemen bagi nasabah yang bertitik tolak pada jenis kredit investasi dan modal kerja (memiliki usaha ekonomi produktif).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, D. 1996. *Peranan Permodalan Pada Sub Sektor Agroindustri di Indonesia*. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Faperta IPB. Bogor.
- Asnawi Dwi. 1999. *Efektifitas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Dalam Membantu Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. (Tidak Dipublikasikan).
- Draper, N. dan Smith, H. 1992. *Analisis Regresi Terapan*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hidayat. 1979. *Sektor Informasi dalam Struktur Ekonomi Indonesia*. Profil Indonesia, Lembaga Penerbit Studi Pembangunan, Jakarta.
- Hasbullah, I. 1995. *Studi tentang Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Memengaruhi Keputusan Petani Mengambil Kredit Usahatani Padi dan penyebab Terjadinya Tunggakan*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. (Tidak Dipublikasikan)
- Mubyarto dan Hamid E.S.. 1996. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.

Nazir, M.. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Singarimbun, M.. 1982. *Penelitian Ilmiah – Dasar Metode Teknik*. Penerbit Tarsito. Bandung.

Wibisana, dkk.. 1988. *Penelitian Penyempurnaan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Faperta Universitas Brawijaya Malang. Malang.